

Peningkatan kompetensi administrasi pkk desa gedangan melalui digitalisasi sistem manajemen sdm

Fidela Berliani Prasaja Putri
¹Fakultas Bisnis, Universitas Setia Budi, Indonesia

Article Info

Article history

Received : Dec 05, 2025
Revised : Dec 11, 2025
Accepted : Jan 08, 2026

Kata Kunci:

Administrasi PKK;
Digitalisasi;
Manajemen SDM;
Tata kelola organisasi.

Abstrak

Administrasi PKK di tingkat desa memerlukan pengelolaan yang akuntabel dan efisien seiring meningkatnya tuntutan tata kelola organisasi berbasis masyarakat. Administrasi PKK Desa Gedangan masih didominasi pencatatan manual yang menyebabkan duplikasi data, keterlambatan pelaporan, dan keterbatasan akses arsip. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi kader PKK Desa Gedangan dalam pengelolaan administrasi sumber daya manusia melalui penerapan sistem administrasi digital. Metode pelaksanaan meliputi analisis kebutuhan, penyusunan modul pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi administrasi digital, serta evaluasi kompetensi kader sebelum dan sesudah kegiatan berdasarkan indikator pengelolaan data anggota, dokumentasi kegiatan, dan kearsipan organisasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan kader dalam mengelola data secara sistematis, mempercepat proses dokumentasi, serta meningkatkan ketertiban arsip administrasi. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan model pemberdayaan PKK berbasis digitalisasi administrasi yang aplikatif dan kontekstual, serta menjadi rujukan pengembangan tata kelola PKK desa dalam menghadapi transformasi digital.

Abstract

PKK administration at the village level requires accountable and efficient management in response to increasing demands for community-based organizational governance. The administration of PKK Desa Gedangan is still predominantly conducted through manual record-keeping, resulting in data duplication, delays in reporting, and limited access to archival information. This community service activity aims to enhance the competence of PKK cadres in managing human resource administration through the implementation of a digital administrative system. The methods employed include needs analysis, development of training modules, implementation of training and mentoring on the use of digital administrative applications, and evaluation of cadre competence before and after the activity based on indicators of member data management, activity documentation, and organizational archiving. The results indicate an improvement in cadres' ability to manage data systematically, accelerate documentation processes, and enhance the organization of administrative archives. This activity contributes to strengthening an applicable and context-based digital administration empowerment model for PKK and serves as a reference for improving village-level PKK governance in responding to digital transformation.

Corresponding Author:

Fidela Berliani,
Fakultas Bisnis
Universitas Setia Budi
Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127
fidelaBerliani@setiabudi.ac.id

This is an open access article under the CC BY-NC license.



PENDAHULUAN

Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang bekerja pada tingkat keluarga dan desa untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Peran PKK tidak hanya bersifat operasional dalam pelaksanaan program-program keluarga, tetapi juga strategis sebagai mediator antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan lokal sehingga keberlanjutan program pemberdayaan bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas pengelolaan administrasinya (Syaifuddin Zuhri & Mursyidah, 2024). Dengan demikian, administrasi PKK menjadi fondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan program, transparansi organisasi, serta akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Meskipun fungsinya krusial, banyak PKK di tingkat desa masih menerapkan praktik administrasi yang berbasis pencatatan manual. Praktik ini mengakibatkan beberapa kendala operasional: duplikasi data, keterlambatan pelaporan, kesulitan dalam pelacakan arsip historis, dan keterbatasan dalam menghasilkan data yang dapat digunakan untuk perencanaan evidence-based. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masalah inti yang dihadapi PKK desa bukan sekadar keterbatasan sarana, melainkan lemahnya sistem administrasi dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola informasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi tersebut membatasi kemampuan PKK untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan akurat, serta mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola program.

Digitalisasi administrasi pada tingkat desa telah muncul sebagai respons praktis terhadap permasalahan tersebut. Studi dan inisiatif terbaru mengenai transformasi digital pemerintahan desa menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi ke dalam sistem administrasi memungkinkan peningkatan aksesibilitas data, efisiensi proses, serta kemudahan pelaporan dan monitor program pada level lokal. Namun, bukti empiris juga menekankan bahwa transformasi ini bukan hanya soal teknologi melainkan soal perubahan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan penataan proses kerja yang mendasar (Sihombing & Lumbantobing, 2024). Dalam konteks PKK desa, kajian yang secara spesifik menelaah digitalisasi administrasi organisasi PKK—terutama dari perspektif manajemen sumber daya manusia dan pemberdayaan kader—masih relatif terbatas, sehingga diperlukan studi yang berangkat dari praktik nyata di tingkat komunitas.

Dalam ranah manajemen sumber daya manusia (SDM), digitalisasi (mis. HRIS, Learning Management Systems, aplikasi pengelolaan data) terbukti dapat memperbaiki fungsi-fungsi HR seperti pendataan, pengembangan kompetensi, pengarsipan, dan evaluasi kinerja. Penerapan alat-alat digital tersebut dapat mempercepat alur informasi, mendukung pelatihan berkelanjutan, serta menghasilkan jejak audit yang memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Namun, literatur juga mencatat sejumlah tantangan, antara lain kapasitas literasi digital kader, ketersediaan infrastruktur, dan kebutuhan customisasi aplikasi agar sesuai konteks lokal (Geohansa et al., 2025).

Konteks Desa Gedangan menggambarkan persoalan tipikal di banyak desa: sumber daya administrasi yang terbatas, rutinitas manual, serta kebutuhan mendesak untuk data yang terintegrasi demi perencanaan dan pelaporan program pemberdayaan. PKK Desa Gedangan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki tingkat partisipasi kader yang relatif tinggi, dukungan kelembagaan desa yang memadai, serta kesiapan organisasi untuk menerima inovasi administrasi, sehingga memungkinkan pelaksanaan dan evaluasi intervensi secara optimal. Oleh karena itu, intervensi yang menggabungkan penyediaan perangkat lunak/adopsi aplikasi, modul pelatihan berbasis praktik, serta pendampingan implementasi merupakan strategi yang tepat untuk memperkuat kapasitas kader sekaligus memastikan keberlanjutan perubahan proses administratif. Intervensi semacam ini perlu dirancang dengan memperhatikan aspek teknis (kesesuaian fungsi aplikasi), pedagogis (metode pelatihan), dan institusional (kebijakan internal dan pola kerja) (Sugiyono, 2024).

Kegiatan pengabdian yang menjadi fokus tulisan ini mengadopsi pendekatan hibrid: (1) analisis kebutuhan administrasi untuk memetakan celah data dan proses; (2) perancangan modul pelatihan yang kontekstual; (3) implementasi aplikasi manajemen SDM sederhana yang disesuaikan; dan (4) evaluasi perubahan kompetensi serta proses kerja. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan bukti praktis bahwa digitalisasi yang disertai penguatan kapasitas manusia dapat meningkatkan efektivitas administrasi PKK — bukan sekadar penggantian media pencatatan—serta memperbaiki kemampuan

organisasi dalam menyediakan data untuk perencanaan dan akuntabilitas public (Didik Sofian Haryadi, 2025).

Di samping potensi manfaat, penelitian ini juga mengakui risiko implementasi: resistensi terhadap perubahan, keterbatasan akses internet atau perangkat, serta kemungkinan kebutuhan dukungan jangka panjang untuk pemeliharaan sistem. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dari desain intervensi adalah membangun mekanisme transfer kemampuan (*capacity building*) yang memungkinkan kader lokal mengelola dan memelihara sistem serta menyesuaikan proses sesuai dinamika desa. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut menjadi bagian integral dari evaluasi keberhasilan pelaksanaan program (Frinaldi et al., 2024).

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi literatur pengabdian kepada masyarakat dan manajemen publik desa dengan menawarkan model digitalisasi administrasi PKK yang terintegrasi antara teknologi, pelatihan, dan pendampingan berbasis konteks lokal. Dengan demikian, penguatan administrasi PKK melalui digitalisasi manajemen SDM dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan *desain embedded*, di mana data kualitatif menjadi dasar untuk memahami proses digitalisasi administrasi PKK Desa Gedangan, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk mengukur perubahan kompetensi kader setelah implementasi sistem digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan kedalaman analisis kualitatif dengan pengukuran empiris yang lebih objektif, terutama dalam studi mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan berbasis teknologi di tingkat desa (Stefano Ba, 2021). Masalah inti yang diuji melalui desain metode campuran ini adalah apakah dan bagaimana digitalisasi administrasi—yang disertai pelatihan dan pendampingan—mampu meningkatkan kompetensi kader serta memperbaiki praktik tata kelola PKK secara nyata, bukan hanya pada tataran persepsi, tetapi juga pada perubahan proses kerja dan kualitas data administrasi. Dengan demikian, desain penelitian diarahkan untuk menguji keterkaitan antara intervensi digital, adaptasi organisasi, dan capaian kompetensi kader.

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan dan melibatkan 25 kader serta pengurus PKK yang dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan administrasi. Prosedur penelitian dimulai dengan analisis kebutuhan administrasi manual melalui observasi, wawancara awal, dan telaah dokumen. Temuan analisis kebutuhan digunakan untuk merancang modul pelatihan serta penyesuaian aplikasi manajemen data digital yang sesuai dengan konteks PKK. Desain tertanam (*embedded design*) dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat secara eksplanatoris murni, maupun membangun teori baru secara eksploratif, melainkan menilai efektivitas suatu intervensi praktis dengan menempatkan data kuantitatif sebagai pelengkap yang tertanam dalam kerangka kualitatif utama. Oleh karena itu, desain ini dinilai lebih tepat dibandingkan desain sekuensial eksplanatori atau eksploratori yang menempatkan kedua jenis data secara terpisah dan berurutan. Jenis desain tertanam yang digunakan adalah *qualitatively driven embedded design*, di mana data kualitatif berperan dominan untuk menjelaskan proses, konteks, dan dinamika perubahan, sementara data kuantitatif berfungsi sebagai komponen pendukung untuk memverifikasi arah dan besaran perubahan kompetensi sebelum dan sesudah intervensi.

Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui sesi pelatihan teori dan praktik, diikuti pendampingan intensif selama tiga bulan masa implementasi digitalisasi. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan menggunakan kuesioner pre-post untuk mengukur aspek kompetensi administrasi digital, akurasi data, dan efisiensi kerja. Validitas instrumen kuantitatif dijamin melalui proses uji validitas isi (*content validity*) dengan melibatkan ahli administrasi dan teknologi informasi desa, serta uji keterbacaan dan kejelasan item kepada responden sebelum pelaksanaan pre-test. Reliabilitas instrumen diperkuat melalui uji konsistensi internal sehingga indikator yang digunakan benar-benar merepresentasikan kompetensi administrasi digital yang diukur. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen administratif sebelum dan sesudah digitalisasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking*, serta *audit trail* proses analisis sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif yang

berorientasi praktik. Untuk meminimalkan pengaruh faktor eksternal, pengukuran pre-post dilakukan dalam rentang waktu yang relatif terkendali dan pada kelompok responden yang sama, serta dikombinasikan dengan data kualitatif yang menelusuri perubahan praktik kerja secara langsung. Dengan demikian, perubahan yang teridentifikasi dapat dikaitkan secara lebih meyakinkan dengan intervensi digitalisasi, meskipun penelitian ini tetap mengakui keterbatasan dalam mengisolasi pengaruh eksternal secara absolut.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif dan uji beda pre-post, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan penarikan tema utama. Integrasi data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara analitis melalui proses joint interpretation, yaitu membandingkan hasil uji kuantitatif dengan tema-tema kualitatif yang muncul untuk mengidentifikasi titik konvergensi, divergensi, dan saling melengkapi. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi hasil yang lebih komprehensif, bukan sekadar penyajian dua jenis data secara paralel.

Temuan metode ini didukung oleh penelitian terkini yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat proses layanan, selama ditopang oleh literasi digital memadai dan dukungan kelembagaan (Rizky Firmansyah et al., 2024); (Silviati et al., 2024). Studi lain menegaskan bahwa penguatan kapasitas komunitas perempuan melalui adopsi teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan kegiatan dan dokumentasi organisasi (Septimawan Sutopo, 2025). Oleh karena itu, metode penelitian ini dirancang tidak hanya untuk menilai dampak intervensi, tetapi juga untuk memahami dinamika adaptasi digital di lingkungan organisasi akar rumput seperti PKK.

Dari sisi replikasi, metode penelitian ini dirancang fleksibel dan adaptif, sehingga dapat diterapkan di desa lain dengan kondisi berbeda melalui penyesuaian pada jenis aplikasi, intensitas pelatihan, serta strategi pendampingan sesuai tingkat literasi digital dan ketersediaan infrastruktur lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Peningkatan Kompetensi Administrasi Digital Kader

Pengukuran kompetensi administrasi digital dilakukan melalui instrumen penilaian berbasis skala Likert 1-5 yang mencakup lima indikator utama: (1) kemampuan input data anggota, (2) pengelolaan arsip digital, (3) penyusunan laporan digital, (4) ketepatan pelaporan, dan (5) literasi digital umum. Sebelum intervensi pelatihan, skor rata-rata kompetensi berada pada rentang 2.5-3.0, yang menggambarkan kemampuan dasar yang masih terbatas. Setelah program pelatihan dan pendampingan berlangsung selama tiga bulan, skor rata-rata meningkat menjadi 4.0-4.4.

Peningkatan paling signifikan terlihat pada kemampuan input data anggota (dari 2.8 ke 4.3; selisih 1.5) dan ketepatan pelaporan (dari 3.0 ke 4.4; selisih 1.4). Hasil uji statistik menggunakan paired t-test menunjukkan nilai $p < 0.001$, yang berarti peningkatan tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, pelatihan administrasi digital terbukti mampu meningkatkan kompetensi kader secara terukur.

Tabel 1. Perubahan Skor Kompetensi Administrasi Digital Kader PKK (n = 25)

Indikator Kompetensi	Pra-Intervensi (Mean)	Pasca-Intervensi (Mean)	Selisih	Keterangan
Input data anggota	2.8	4.3	+1.5	Meningkat signifikan
Pengelolaan arsip digital	2.5	4.1	+1.6	Meningkat
Penyusunan laporan digital	2.7	4.2	+1.5	Meningkat
Ketepatan pelaporan	3.0	4.4	+1.4	Meningkat signifikan
Literasi digital umum	2.9	4.0	+1.1	Meningkat

Peningkatan skor kompetensi yang signifikan pada seluruh indikator menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukan bersifat kebetulan, melainkan merupakan hasil langsung dari intervensi

pelatihan dan pendampingan yang dirancang secara kontekstual. Hal ini diperkuat oleh nilai reliabilitas instrumen yang tinggi (Cronbach's Alpha = 0,87), yang memastikan bahwa perbedaan skor pra dan pascaintervensi mencerminkan perubahan kemampuan yang konsisten, bukan fluktuasi pengukuran.

Secara metodologis, fokus analisis kuantitatif pada perbandingan rerata pra-pasca dipilih karena tujuan penelitian adalah menilai dampak fungsional digitalisasi dalam konteks organisasi komunitas, bukan melakukan generalisasi inferensial terhadap populasi luas. Oleh karena itu, perubahan skor kompetensi dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan intervensi pada level kelembagaan PKK Desa Gedangan.

Integrasi data kualitatif menunjukkan bahwa kader dengan literasi digital awal rendah justru mengalami peningkatan skor paling tajam. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelatihan berperan sebagai mekanisme pengurang kesenjangan digital internal, sehingga digitalisasi tidak hanya meningkatkan kapasitas rata-rata, tetapi juga mendorong pemerataan kompetensi antar kader.

b. Efisiensi Administrasi PKK Setelah Digitalisasi

Efisiensi diukur melalui empat indikator: (1) waktu penyusunan laporan, (2) kecepatan pencarian arsip, (3) tingkat kesalahan data, dan (4) jumlah duplikasi dokumen. Sebelum digitalisasi, penyusunan laporan bulanan memerlukan waktu rata-rata 2–3 hari dengan proses verifikasi manual. Setelah penggunaan aplikasi digital, waktu penyusunan laporan menurun signifikan menjadi 5–8 jam (kurang dari satu hari).

Perubahan paling drastis terlihat pada proses penelusuran arsip. Sebelumnya, pencarian dokumen membutuhkan waktu 20–40 menit, sementara setelah penggunaan aplikasi digital waktu pencarian turun menjadi 5–10 detik melalui fitur kata kunci. Penurunan kesalahan input juga signifikan—kesalahan pencatatan turun dari 12% menjadi 3% setelah sistem digital diterapkan. Selain itu, duplikasi data anggota berkurang dari 18 kasus menjadi hanya 2 kasus dalam tiga bulan evaluasi.

Tabel 2. Efisiensi Administrasi Sebelum dan Sesudah Digitalisasi

Indikator Efisiensi	Sebelum Digitalisasi	Sesudah Digitalisasi	Perubahan
Waktu penyusunan laporan bulanan	2–3 hari	< 1 hari	Lebih cepat 60–70%
Waktu pencarian arsip	20–40 menit	5–10 detik	Lebih cepat >98%
Tingkat kesalahan data	12%	3%	Turun 75%
Kasus duplikasi data	18 kasus	2 kasus	Turun drastis

Penurunan waktu kerja, kesalahan pencatatan, dan duplikasi data menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan bersifat struktural, bukan semata-mata akibat peningkatan kecepatan individu kader. Sistem digital berfungsi sebagai instrumen standarisasi prosedur, sehingga variasi gaya pencatatan dan ketergantungan pada kader tertentu dapat diminimalkan.

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa efisiensi tertinggi dicapai setelah kader terbiasa menggunakan fitur otomatisasi dan pencarian arsip. Hal ini menandakan bahwa dampak digitalisasi bersifat progresif, di mana manfaat optimal baru muncul setelah fase adaptasi awal terlewati. Dengan demikian, efisiensi yang tercatat dalam penelitian ini tidak hanya mencerminkan perubahan jangka pendek, tetapi juga potensi keberlanjutan sistem dalam jangka menengah.

Secara analitis, temuan efisiensi ini diperkuat oleh data kualitatif yang menunjukkan perubahan pola kerja kader dari berbasis dokumen fisik menjadi berbasis data digital. Integrasi ini memastikan bahwa data kuantitatif tidak berdiri sendiri, melainkan merepresentasikan perubahan nyata dalam praktik administrasi PKK.

c. Respons Kader terhadap Penggunaan Sistem Digital

Data respons kader diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan survei kepuasan penggunaan aplikasi. Dari 25 kader, 92% menyatakan aplikasi mudah digunakan, serta 88% merasa pekerjaan administrasi menjadi lebih cepat dan ringan. Selain itu, 76% kader melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi digital sehari-hari.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti akses internet yang tidak stabil pada jam-jam tertentu serta kebutuhan pendampingan lanjutan bagi beberapa kader dengan literasi digital rendah. Kendala ini bersifat teknis dan relatif dapat diatasi melalui dukungan perangkat desa dan pelatihan tambahan.

Meskipun terdapat variasi tingkat adaptasi antar kader, tidak ditemukan indikasi penolakan terhadap sistem digital. Sebaliknya, kader yang mengalami kesulitan menunjukkan kecenderungan mengadopsi strategi kolaboratif, seperti pembagian tugas administrasi dan saling berbagi pengetahuan teknis. Pola ini memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak memicu eksklusi internal, melainkan mendorong pembelajaran sosial dalam organisasi. Respons positif kader terhadap sistem digital juga berfungsi sebagai indikator validasi eksternal terhadap temuan kuantitatif. Persepsi kemudahan penggunaan dan peningkatan kepercayaan diri selaras dengan peningkatan skor kompetensi dan efisiensi kerja, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa perubahan pra-pasca intervensi dapat dikaitkan secara dominan dengan program digitalisasi, bukan faktor eksternal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain mixed-methods tertanam memungkinkan pengujian dampak intervensi secara kuantitatif sekaligus pemahaman proses adaptasi secara kualitatif. Data kuantitatif berfungsi sebagai bukti perubahan terukur, sementara data kualitatif menjelaskan mekanisme, konteks, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Integrasi analitis ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya menjawab pertanyaan “seberapa besar dampak digitalisasi”, tetapi juga “bagaimana dan mengapa dampak tersebut terjadi” dalam konteks organisasi PKK

Pembahasan

a. Penguatan Kapasitas Melalui Pelatihan Terstruktur

Peningkatan skor kompetensi administrasi digital yang terlihat pada tabel hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pelatihan yang dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas kader PKK Desa Gedangan. Kenaikan skor dari kategori “cukup” menuju “baik”, terutama pada indikator input data anggota (dari 2,8 menjadi 4,3) dan ketepatan pelaporan (dari 3,0 menjadi 4,4), memberi gambaran bahwa peserta bukan hanya memahami prosedur digital, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam praktik administrasi sehari-hari. Data ini mengindikasikan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sistem digital. Pemanfaatan peningkatan kompetensi ini secara langsung menjawab fokus utama desain metode campuran yang digunakan, yaitu menguji apakah intervensi digitalisasi mampu menghasilkan perubahan kemampuan administratif yang terukur sekaligus berkelanjutan pada kader PKK. Data kuantitatif menunjukkan besaran perubahan, sementara data kualitatif menjelaskan proses adaptasi dan pembelajaran yang melatarbelakangi peningkatan tersebut. Penggunaan desain tertanam (*embedded design*) menjadi relevan karena data kualitatif tidak dimaksudkan untuk membangun atau menjelaskan model secara terpisah, melainkan untuk memperkuat dan memvalidasi hasil pengukuran kuantitatif dalam konteks praktik administrasi PKK.

Efektivitas pelatihan ini tidak terlepas dari pendekatan *hands-on training*, di mana peserta terlibat langsung dalam proses pengoperasian aplikasi selama sesi pelatihan. Model pelatihan ini memungkinkan peserta belajar dengan mencoba secara langsung, mengurangi jarak antara teori dan praktik, serta meminimalkan kecemasan teknologi (*technology anxiety*) yang umum terjadi pada komunitas perempuan dan kader berbasis desa. Pendampingan intensif yang diberikan setelah pelatihan juga menjadi faktor pendukung utama. Selama masa pendampingan, kader dibimbing dalam menyelesaikan permasalahan teknis, mengoreksi kesalahan input data, dan menyempurnakan alur kerja administrasi digital.

Temuan ini konsisten dengan studi (Andini et al., 2025), yang menemukan bahwa pelatihan berbasis praktik merupakan pendekatan paling efektif dalam penguatan keterampilan digital pada kelompok komunitas desa. Pelatihan yang relevan dengan konteks tugas peserta terbukti meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi. Hal serupa diperkuat oleh penelitian (Sabri et al., 2024), yang menunjukkan bahwa pendampingan lanjutan berfungsi menjaga keberlanjutan praktik digital, terutama pada kelompok perempuan yang sebelumnya terbatas literasi teknologinya. Dengan demikian, keberhasilan pelatihan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada organisasi akar rumput seperti PKK tidak hanya bergantung pada penyediaan aplikasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran yang sistematis dan partisipatif.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa peserta yang memiliki literasi digital rendah pada awalnya—ditunjukkan dengan skor 2,5–2,9 pada sebagian besar indikator—mengalami peningkatan paling signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan terstruktur dapat membantu

kader yang kurang familiar dengan teknologi untuk mencapai kemampuan yang setara dengan peserta yang memiliki pengalaman lebih baik. Peningkatan kemampuan yang merata juga memperkecil kesenjangan digital (*digital divide*) antar kader, sebuah kondisi yang sebelumnya menjadi hambatan dalam penerapan sistem administrasi yang terstandarisasi (Dimas & Fahlevvi, 2024).

Temuan ini sejalan dengan teori penguatan kapasitas (*capacity building*) yang menyatakan bahwa proses pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan nyata peserta, didukung dengan materi yang aplikatif, akan mempercepat proses adopsi teknologi dan mendorong perubahan perilaku kerja (Nugraha, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi administrasi PKK Desa Gedangan sangat dipengaruhi oleh desain pelatihan yang komprehensif, berkesinambungan, dan responsif terhadap kebutuhan kader.

b. Efisiensi Administrasi melalui Sistem Informasi Terintegrasi

Penerapan sistem administrasi digital pada PKK Desa Gedangan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja organisasi. Data penelitian menunjukkan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan bulanan berkurang dari 2–3 hari menjadi kurang dari 8 jam kerja. Perubahan ini menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar lebih dari 60%, yang terutama dipengaruhi oleh fitur otomatisasi rekap data dan format laporan yang tersusun secara digital. Selain itu, kesalahan pencatatan—termasuk duplikasi nama anggota, inkonsistensi format, dan kehilangan data—menurun drastis setelah sistem digital digunakan secara rutin. Temuan observasi lapangan menunjukkan bahwa sistem digital meminimalkan variasi gaya pencatatan antar kader, sehingga meningkatkan konsistensi dan keakuratan informasi.

Efisiensi juga meningkat pada aspek pengarsipan. Sebelum digitalisasi, pencarian dokumen fisik membutuhkan waktu 20–40 menit, terutama karena penyimpanan arsip manual sering bercampur antar-bidang. Setelah penggunaan aplikasi digital, waktu pencarian berkurang menjadi kurang dari satu menit berkat fitur penelusuran (*search engine*) internal aplikasi. Perubahan signifikan ini menunjukkan bahwa sistem informasi terintegrasi tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga membantu kader mengakses data secara tepat waktu untuk keperluan rapat, evaluasi, maupun pelaporan kepada pemerintah desa. Perubahan efisiensi yang terukur sebelum dan sesudah intervensi dapat secara dominan dikaitkan dengan penerapan sistem digital, karena selama periode penelitian tidak terdapat perubahan struktur organisasi, beban kerja, maupun kebijakan administratif PKK. Dengan demikian, variabel eksternal dapat dikendalikan secara kontekstual, sehingga peningkatan efisiensi merefleksikan dampak langsung dari intervensi digitalisasi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian terapan, di mana validitas kausal dibangun melalui konsistensi data kuantitatif dan konfirmasi kualitatif atas perubahan praktik kerja, bukan melalui kontrol eksperimental yang ketat.

Temuan penelitian ini mendukung hasil studi (Hombone, 2025), yang menegaskan bahwa digitalisasi administrasi desa mampu meningkatkan kinerja layanan dan memperbaiki akurasi data melalui penerapan sistem informasi yang terstandar. Demikian pula, penelitian (Riswakhayuningsih, 2022) menjelaskan bahwa integrasi sistem digital pada level desa mendorong tata kelola yang lebih transparan, terutama karena setiap aktivitas administrasi terekam dan dapat ditelusuri kembali secara digital. Dengan demikian, PKK Desa Gedangan tidak hanya mengalami peningkatan efisiensi internal, tetapi juga memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas dan dapat diakses setiap saat. Selain perubahan teknis, peningkatan efisiensi ini juga memperkuat kapasitas organisasi dalam merespons tuntutan akuntabilitas dari pemerintah desa. Digitalisasi memudahkan proses verifikasi data kegiatan PKK, mulai dari kehadiran peserta hingga realisasi program kerja. Seluruh data tersimpan secara sistematis dan tidak lagi bergantung pada ingatan atau catatan individual kader. Kondisi ini sangat penting bagi PKK sebagai organisasi masyarakat yang memiliki kewajiban pelaporan rutin dan sering mengalami ketergantungan pada satu atau dua kader dengan kemampuan administrasi lebih tinggi. Dengan sistem digital, beban kerja menjadi lebih merata dan penguasaan informasi tidak lagi bersifat terpusat selaras dengan penelitian (Nangameka & Kusmana, 2024).

Lebih jauh, hasil penelitian mengindikasikan bahwa digitalisasi menciptakan alur kerja yang lebih adaptif. Misalnya, ketika terjadi perubahan jadwal kegiatan atau kebutuhan pembaruan laporan mendadak, kader dapat memperbarui data langsung melalui perangkat digital tanpa harus menyalin ulang dokumen fisik. Kecepatan ini tidak mungkin dicapai apabila administrasi masih sepenuhnya berbasis kertas. Temuan tersebut sejalan dengan literatur bahwa sistem informasi terintegrasi berperan dalam menciptakan real-time data update dan memungkinkan organisasi desa merespons perubahan secara cepat (Firgia et al., 2022).

Dengan demikian, digitalisasi administrasi pada PKK Desa Gedangan tidak hanya mengefisienkan

proses kerja secara teknis, tetapi juga memperkuat tata kelola organisasi secara menyeluruh. Perubahan ini mencakup akurasi data, kecepatan layanan administrasi, kepastian pencatatan, hingga peningkatan akuntabilitas publik. Kombinasi antara aplikasi digital, peningkatan literasi kader, serta dukungan perangkat desa terbukti menjadi elemen strategis dalam membangun sistem administrasi PKK yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.

c. Tantangan Implementasi: Infrastruktur dan Literasi Digital

Meskipun hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas administrasi PKK, implementasi digitalisasi tidak terlepas dari sejumlah kendala yang memengaruhi konsistensi dan keberlanjutan penggunaan sistem. Salah satu hambatan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan infrastruktur internet di lingkungan Desa Gedangan. Berdasarkan catatan observasi dan wawancara, beberapa kader mengalami kesulitan mengakses aplikasi pada jam-jam tertentu akibat jaringan yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini berdampak langsung pada proses input data dan pengunggahan dokumen digital, sehingga beberapa tugas administratif tetap harus ditunda hingga koneksi jaringan kembali normal. Kondisi ini selaras dengan temuan (Maulana et al., 2024), yang menegaskan bahwa kualitas jaringan internet merupakan faktor krusial dalam keberhasilan transformasi digital di tingkat desa, terutama pada wilayah yang belum memiliki infrastruktur memadai.

Selain masalah jaringan, variasi literasi digital antar kader juga turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem. Data pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar kader berada pada kategori literasi digital dasar, khususnya pada penggunaan perangkat dan navigasi aplikasi. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara, yang menunjukkan bahwa kader dengan usia lebih senior membutuhkan waktu lebih panjang untuk beradaptasi dibandingkan kader yang lebih muda. Faktor perbedaan kemampuan digital ini berpengaruh pada kecepatan kerja dan efisiensi kolaborasi dalam pengelolaan administrasi digital. Studi (Geohansa et al., 2025) juga mengungkapkan bahwa tingkat literasi pengguna merupakan variabel penentu dalam adopsi teknologi pada organisasi komunitas, sehingga perlu ada strategi pendampingan berkelanjutan hingga seluruh kader mencapai standar kompetensi minimum. Kendala lainnya muncul pada aspek ketersediaan perangkat. Meskipun aplikasi dapat diakses melalui ponsel, tidak semua kader memiliki perangkat yang memadai untuk menjalankan fitur dengan optimal. Dalam beberapa kasus, kapasitas penyimpanan ponsel yang terbatas menghambat pengunduhan dokumen atau pembaruan aplikasi. Hal ini menandakan pentingnya dukungan institusional dalam penyediaan perangkat yang sesuai, terutama bagi kader yang memiliki peran administratif utama. Selain itu, perubahan dari sistem manual ke digital juga menuntut adanya disiplin dalam menjaga keamanan data, namun berdasarkan evaluasi lapangan, beberapa kader masih belum familiar dengan praktik keamanan informasi seperti pengelolaan kata sandi dan perlindungan dokumen digital.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi dan pelatihan awal, tetapi juga ditopang oleh kesiapan infrastruktur, kemampuan teknis kader, dan dukungan berkelanjutan dari pemangku kepentingan (Maghfira et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan desa yang berorientasi pada penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi secara bertahap, dan penyediaan perangkat standar minimal untuk memastikan bahwa seluruh kader dapat mengakses dan memanfaatkan sistem secara setara. Dukungan jangka panjang ini penting untuk mencegah terjadinya digital divide internal dalam organisasi PKK serta memastikan keberlanjutan program digitalisasi administrasi di masa mendatang. Kehadiran kendala infrastruktur dan literasi digital tidak melemahkan temuan penelitian, tetapi justru memperkuat validitas ekologis (ecological validity), karena hasil diperoleh dalam kondisi nyata desa. Hal ini menunjukkan bahwa model digitalisasi yang diterapkan bersifat adaptif dan dapat bekerja dalam keterbatasan, selama disertai pendampingan yang memadai.

d. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting bagi pengembangan administrasi organisasi komunitas di tingkat desa. Temuan mengenai peningkatan kompetensi kader dan efisiensi alur kerja administrasi menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat tata kelola PKK dan lembaga masyarakat sejenis. Model implementasi yang diterapkan—meliputi pelatihan terstruktur, pendampingan, serta penggunaan aplikasi sederhana—dapat direplikasi pada organisasi komunitas lain yang menghadapi kendala serupa dalam pengelolaan data dan pelaporan

sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan (Jaeroni et al., 2025). Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan berkelanjutan memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan adaptasi teknologi, terutama bagi kader yang sebelumnya kurang terbiasa dengan perangkat digital sejalan dengan penelitian (Meichasari & Wirawan, 2025). Di sisi lain, temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan sistem digital yang relatif sederhana sudah mampu meningkatkan ketepatan data, mengurangi duplikasi pencatatan, serta mempercepat proses pelaporan tanpa memerlukan infrastruktur teknologi yang kompleks. Namun, keberhasilan jangka panjang dari upaya digitalisasi ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa, baik dalam penyediaan fasilitas jaringan, pembaruan perangkat, maupun integrasi sistem administrasi PKK dengan platform digital desa yang lebih luas. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi internal organisasi, tetapi juga memperkuat sinergi antara PKK dan pemerintah desa sebagai bagian dari pembangunan tata kelola berbasis data di tingkat lokal (Briyadi et al., 2025). Model intervensi yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki potensi replikasi pada desa dengan karakteristik berbeda, karena tidak bergantung pada infrastruktur kompleks dan dirancang berdasarkan kebutuhan administratif lokal. Adaptasi dapat dilakukan pada durasi pendampingan, platform aplikasi, dan tingkat literasi kader, tanpa mengubah prinsip dasar pelatihan berbasis praktik dan integrasi data digital.



Gambar 1: Melakukan Evaluasi administrasi secara manual



Gambar 2: Melakukan implementasi administrasi secara digitalisasi

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program digitalisasi administrasi PKK di Desa Gedangan mampu meningkatkan kapasitas kader dan memperbaiki efektivitas pengelolaan organisasi secara nyata. Pelaksanaan pelatihan yang terstruktur dan disertai pendampingan berkelanjutan berkontribusi pada peningkatan kemampuan kader dalam mengelola data keanggotaan, menyusun laporan, serta melakukan pengarsipan secara digital, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya efisiensi kerja dan menurunnya kesalahan pencatatan administrasi. Kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penyusunan model penguatan administrasi PKK berbasis digital yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi organisasi masyarakat di tingkat desa. Namun demikian, pelaksanaan program masih memiliki keterbatasan, terutama terkait cakupan lokasi yang terbatas pada satu desa, perbedaan tingkat literasi digital antar kader, serta belum dilakukannya evaluasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan implementasi pada desa dengan karakteristik yang berbeda, mengembangkan integrasi sistem administrasi PKK dengan platform digital desa, serta melakukan evaluasi berkelanjutan guna menilai keberlangsungan dampak digitalisasi terhadap tata kelola organisasi dan pemberdayaan kader secara jangka panjang.

Referensi

Andini, R., Nurdiyanto, A. D., Lestari, U. P., Nafa, A., Wahyuningsih, M., Digital, L. K., & Digital, P. (2025). *Optimalisasi Kapasitas Umkm Melalui Digitalisasi Laporan Keuangan, Pengembangan Sdm, Dan Pemasaran.*

- 2(2), 128–143.
- Briyadi, P., Mustofah, A., & Pramudiana, I. D. (2025). Smart Desa, Layanan Cerdas : Inovasi Digitalisasi Pelayanan Administrasi di Desa Sabrang, Klaten. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4), 143–163.
- Didik Sofian Haryadi. (2025). Digital Transformation in Human Resource Management: Literature Review on Effectiveness and Implementation Challenges. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 387–394. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.4441>
- Dimas, M., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(2), 194–215. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4504>
- Firgia, L., Muhamad Muslih, & Aditya Pratama. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Di Daerah Perbatasan Studi Kasus Desa Cipta Karya. *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra*, 8(2), 101–110. <https://doi.org/10.52005/rekayasa.v8i2.267>
- Frinaldi, A., T Rezeki, A. P., & Saputra, B. (2024). Digital Transformation of Government Administration: Analysis of Efficiency, Transparency, and Challenges in Indonesia. *AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy, 2023(95)*, 82–01. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1096>
- Geohansa, A., Sumarna, E., & Kania, I. (2025). Digitization of Village Government as a Sustainable Development Strategy Towards the Realization of Smart Villages. *Jurnal Polisci*, 2(4), 254–267. <https://doi.org/10.62885/polisci.v2i4.742>
- Hombone, E. (2025). Smart Village sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 122–131. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.380>
- Jaeroni, A., Bukhori, B., Wachdijono, W., Hidayat, Y. R., Puromo, D., & Wahana, S. (2025). Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIAPIK untuk Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Kopi di Desa Cibeureum, Kabupaten Kuningan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(3), 863–874. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1863>
- Maghfira, M., Anisa, A., & Iryani, J. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Layanan Digital Bagi Masyarakat Desa Bontomangiring. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3075–3080. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.977>
- Maulana, R. Y., Subekti, D., Putra, D. S., & ... (2024). Penguatan Kapasitas Digital dalam Menghadapi Transformasi Digital untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Prosiding Seminar ..., November*, 373–384. <https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/prosidingLPPM/article/view/14995%0Ahttps://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/prosidingLPPM/article/view/14995/7041>
- Meichasari, A. I., & Wirawan, D. P. (2025). Efektivitas Kebijakan Penyuluhan Pertanian pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Rejoso Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(4)(November), 289–315.
- Nangameka, T. I., & Kusmana, D. (2024). *Digitalisasi Pengelolaan Administrasi PKK Desa Cilayung Kecamatan Jatinarong sebagai teknis dari birokrasi mampu dikelola dengan baik . Birokrasi dimaksudkan tipe dalam sistem administrasi (Ahmad 2008). Pengelolaan administrasi menjadi kunci bagaimana gencar diakselerasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang . Profesional menjadi salah satu isu karakter masyarakat Sumedang . Salah satu misi yang dicanangkan guna peningkatan benar dan beretika sesuai dengan pedoman yang berlaku . Tambayong (2016) menyebutkan berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparat , baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan publik Winaya , manajemen pemerintahan , pelayanan maupun peningkatan sumber daya aparatur sehingga.*
- Nugraha. (2024). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(3), 1–10. <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/334%0Ahttp://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/334>
- Riswakhayuningsih, T. (2022). RISTEK : Jurnal Riset , Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 7(1), 20–30.
- Rizky Firmansyah, M., Cristina Santoso, A., Farah, A., Monalissa, U., & Reza Adiyanto, M. (2024). Pengaruh Pencatatan Akuntansi Manual Dengan Pencatatan Digital Di Era Globalisasi Dalam Suatu Usaha Snack Rehan Demangan Bangkalan. *Jurnal Media Akademik*, 2(7).
- Sabri, S., Syahputra, R., Luran, M. F., & Amirullah, A. (2024). Pelatihan Pengelolaan SDM Era Digital Pada UMKM Kota Batam. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 518–525. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.4133>
- Septimawan Sutopo, D. (2025). Pemberdayaan Perempuan Desa Melalui Program Digitalisasi UMKM dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2933>
- Sihombing, T., & Lumbantobing, R. D. H. (2024). Digital technology adoption for village public administration— Evidence from Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(4), 1–18. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.3444>

- Silviati, T., Abdurrahman, D., Altim, M. Z., & Suyuti, S. (2024). Penerapan Sistem Digitalisasi Pada Kegiatan Posyandu Melati I Di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. *Journal Of Khairun Community Services (JKC)*, 4(2), 85–93.
- Stefano Ba. (2021). *Qualitative Data Analysis*. 203–223. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6622-0.ch010>
- Sugiyono. (2024). Analysis of the Implementation of Digital Village in Socorejo Village, Tuban District. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 282–287. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i4.482>
- Syaifuddin Zuhri, M., & Mursyidah, L. (2024). *The Role of The PKK in Community Empowerment Program in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. Peran PKK Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. 1–11. <https://doi.org/10.21070/ups.6275>